



LKjIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KAB. LAMONGAN**

2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, taufik dan hidayah, serta izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu, dengan harapan semoga nilai yang diperoleh akan lebih baik dari Tahun 2021. LKjIP ini disusun sebagai perwujudan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan *good government* menuju arah kinerja instansi pemerintah yang semakin transparan dan akuntabel.

Dasar penyajian LKjIP Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal terpenting yang dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Secara substansi LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka implementasi sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Pembangunan dan kemasyarakatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan serta sebagai wujud komitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*Government by Result Oriented*).

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan ini tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Intansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja.

Lamongan, Januari 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN**



UMURONAH, S.ST.,M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19721111 199203 2 010

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | v |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI | 2 |
| C. DATA UMUM ORGANISASI | 5 |
| D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP TAHUN 2022 ... | 7 |
| BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 9 |
| A. RENCANA STRATEGIS | 9 |
| B. RENCANA KINERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 | 12 |
| C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 | 14 |
| BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA | 26 |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | 26 |
| A.1. Pencapaian Kinerja | 26 |
| A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja | 30 |
| A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA | 31 |
| A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional | 33 |
| A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Yang telah Dilakukan | 34 |
| A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... | 37 |
| A.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Pencapaian Kinerja | 50 |

| | |
|---|----|
| B. REALISASI ANGGARAN | 68 |
| BAB IV : PENUTUP | 72 |
| A. KESIMPULAN | 72 |
| B. SARAN | 73 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | |
| • Matrik Rencana Strategis (RS) | |
| • Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2022 | |
| • Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | |
| • Lampiran Lainnya (Penghargaan, Inovasi dll) | |

DAFTAR TABEL

BAB I

| | |
|-----------|---|
| Tabel 1.1 | Klasifikasi SDM DPPP A Kab. Lamongan berdasarkan status kepegawaian..... |
| Tabel 1.2 | Klasifikasi ASN DPPP A Kab. Lamongan berdasarkan golongan |
| Tabel 1.3 | Klasifikasi SDM DPPP A Kab. Lamongan berdasarkan kualifikasi pendidikan |

BAB II

| | |
|-----------|--|
| Tabel 2.1 | Sasaran Strategis dan indicator kinerja DPPP A |
| Tabel 2.2 | Perjanjian Kinerja Tahun 2021 DPPP A..... |

BAB III

| | |
|-----------|---|
| Tabel 3.1 | Pencapaian Kinerja Tahun 2021 DPPP A |
| Tabel 3.2 | Perbandingan Realisasi Kinerja DPPP A |
| Tabel 3.3 | Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA |
| Tabel 3.4 | Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional |
| Tabel 3.5 | Analisis Efisiensi Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tabel 3.7 | Realisasi Pencapaian Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2021..... |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2022 sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan. Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perencanaan Strategis, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026.

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (Performance Plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan. Apabila terjadi perbedaan antara rencana kinerja dengan realisasinya maka harus dicari penyebabnya dan menentukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2022 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sebagai berikut :

1. Dari sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Periode Tahun 2021-2026, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada Tahun 2022 telah direalisasikan dengan baik sekali. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari Kepala Dinas dan staf Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan. di samping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait
2. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2021-2026 yang secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik.

Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama Tahun 2022 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan untuk Rencana Strategis (Renstra) yang akan datang yaitu Tahun 2021-2026 akan difokuskan pada saran-saran dan indikator yang telah ditetapkan, terutama indikator pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1.1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2022, merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah wujud Pertanggungjawaban Pejabat Publik Kepada masyarakat tentang Kinerja Lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi di masing - masing Perangkat Daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip - prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, yang memiliki kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Lamongan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan, termasuk bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah membawa dampak bagi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan Prinsip - Prinsip Tata Pemerintahan yang baik, yakni Partisipatif, Transparansi dan Akuntabilitas.

Perencanaan sistem pencapaian kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang *starting point* pada arah dan kebijakan bagi Pemberdayaan Perempuan melalui Penyelenggaraan Urusan Perlindungan Anak berdasar Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1992 serta penghapusan KDRT berdasar Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dengan menyikapi paradigma yang berkembang selama ini, ternyata telah terjadi *gab* (kesenjangan) antara peran fasilitasi pemerintah dengan tuntutan masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera. Indikasi kesenjangan tersebut nampak pada keterbatasan personil, sarana dan prasarana serta pembiayaan yang dapat disediakan oleh pemerintah.

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peranan yang cukup strategis dalam menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan di Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

TUGAS

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai unsur pelaksana dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pengendalian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pembinaan administrasi Dinas;
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

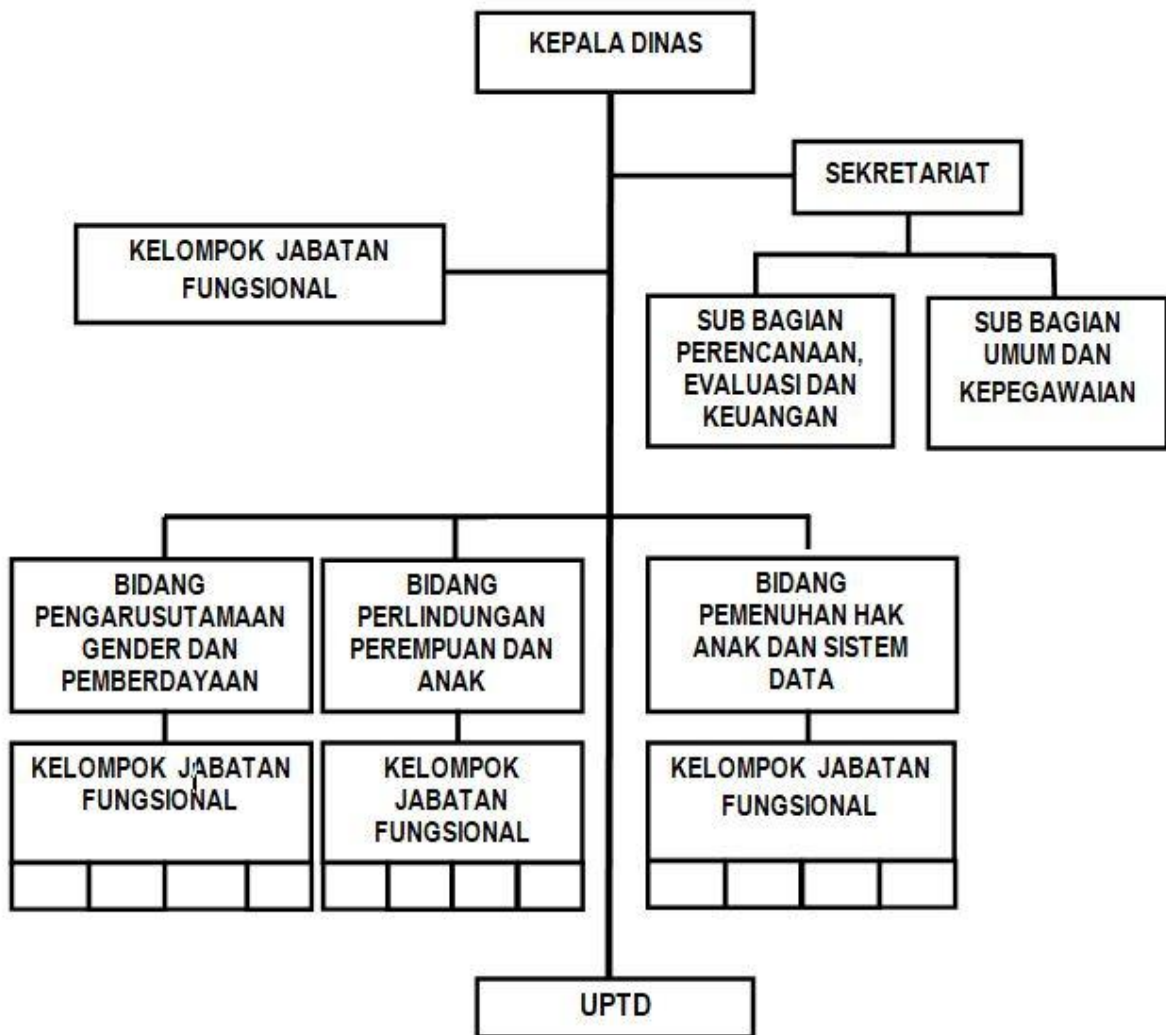
Selanjutnya, berdasarkan landasan hukum yang sama, Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan.
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Membawahi kelompok jabatan fungsional.
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi kelompok jabatan fungsional.
- e. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data, membawahi kelompok jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar berikut ini:

**GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
LAMONGAN**



C. DATA UMUM ORGANISASI

1. KEPEGAWAIAN

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Perangkat Daerah (PD) perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongannya. Kondisi SDM/kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan hingga akhir Agustus Tahun 2022 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut:

**Klasifikasi SDM
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian**

| No | Status Kepegawaian | Jumlah |
|----|--|-----------|
| 1 | Pegawai Negeri Sipil | 19 |
| 2 | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | 0 |
| 3 | Tenaga Kontrak Kerja | 23 |
| | Total | 42 |

**Klasifikasi ASN
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Golongan**

| No | Golongan | Jumlah |
|----|--------------|-----------|
| 1 | IV | 5 |
| 2 | III | 12 |
| 3 | II | 2 |
| 4 | I | - |
| | Total | 19 |

**Klasifikasi SDM
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

| No | Pendidikan | PNS | PPPK | TKK | Jumlah |
|----|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 1 | S2 | 6 | - | - | 6 |
| 2 | S1/D4 | 11 | - | 16 | 27 |
| 3 | D3 | 1 | - | 3 | 4 |
| 4 | SMA/Sederajat | 1 | - | 3 | 4 |
| 5 | SMP/Sederajat | - | - | 1 | 1 |
| | Total | 19 | - | 23 | 42 |

2. SARANA DAN PRASARANA

| NO | JENIS BARANG | KONDISI | | JUMLAH |
|----|--|---------|-------|--------|
| | | BAIK | RUSAK | |
| 1 | Bangunan Kantor | 2 | - | 2 |
| 2 | Roda Empat | 4 | - | 4 |
| 3 | Roda Dua | 4 | - | 4 |
| 4 | Komputer PC | 21 | 1 | 22 |
| 5 | Komputer Notebook | 8 | - | 8 |
| 6 | Printer | 19 | 5 | 24 |
| 7 | AC / Alat Pendingin | 19 | - | 19 |
| 8 | Meja Kerja Eselon II | 1 | - | 1 |
| 9 | Meja Kerja Eselon III | 6 | - | 6 |
| 10 | Meja Kerja Eselon IV | 12 | - | 12 |
| 11 | Meja Tamu | 2 | - | 2 |
| 12 | Meja Kerja Staff | 5 | 2 | 3 |
| 13 | Kursi Eselon II | 2 | - | 2 |
| 14 | Kursi Eselon III | 8 | 2 | 6 |
| 15 | Kursi Eselon IV | 11 | - | 11 |
| 16 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 2 | - | 2 |
| 17 | Kursi Rapat Ruangan Pejabat Eselon III | 3 | - | 3 |
| 18 | Kursi Rapat | 81 | 20 | 101 |
| 19 | Kursi Lipat | 35 | 10 | 45 |
| 20 | Layar Proyektor | 2 | - | 2 |
| 21 | LCD Proyektor | 2 | - | 2 |
| 22 | TV | 1 | - | 1 |
| 23 | CCTV | 16 | - | 16 |
| 24 | Almari | 12 | - | 12 |
| 25 | Rak Besi | 1 | - | 1 |
| 26 | Filling Cabinet | 28 | - | 28 |
| 27 | Almari Arsip | 3 | - | 3 |
| 28 | Penghancur Kertas | 1 | - | 1 |
| 29 | Mesin Absensi | 1 | - | 1 |
| 30 | Tempat Tidur Kayu | 2 | - | 2 |
| 31 | Meja Tulis | 5 | - | 5 |
| 32 | Vacum Cleaner | 1 | - | 1 |
| 33 | Lemari Es | 1 | - | 1 |
| 34 | Sound System | 1 | - | 1 |
| 35 | Camera | 1 | - | 1 |

Dari sarana prasarana yang ada sebagian besar dalam kondisi yang baik dan digunakan untuk :

1. Pendukung operasional administrasi perkantoran
2. Pendukung operasional layanan publik penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak :
 - Gedung Arsip
 - Toilet bagi pengunjung
 - Ruang PUSPAGA dan SHELTER
 - Ruang Tunggu bagi Pengunjung di Lengkapi Televisi dan Pendingin Ruangan
 - Tempat Parkir
 - Mushola
 - Kantin

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP

Sistematika penyajian LKJIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2022 disusun sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
- C. DATA UMUM ORGANISASI
- D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP TAHUN 2022

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. RENCANA KINERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022
- C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

A.1. Pencapaian Kinerja

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Yang telah Dilakukan

A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

A.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Pencapaian Kinerja

B. REALISASI ANGGARAN**BAB IV : PENUTUP**

A. KESIMPULAN

B. SARAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Matrik Rencana Strategis (RS)
- Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2022
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Lampiran Lainnya (Penghargaan, Inovasi dll)

BAB II**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA****A. RENCANA STRATEGIS**

Sebagai upaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan menyusun rencana strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD 2021 – 2026 serta berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat digambarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program yang ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, adalah sebagai berikut :

1. VISI DAN MISI

Sejalan dengan Visi Daerah Kabupaten Lamongan dan juga sebagai pendukung terwujudnya Visi tersebut yang selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan menetapkan Visi:

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. **Kejayaan Lamongan** adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.

2. **Berkeadilan** adalah suatu kondisi dimana Kabupaten Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah**
- Misi 2 : Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman**
- Misi 3 : Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan**
- Misi 4 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius-berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram**
- Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi**

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan perlu dirumuskan Misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, berada pada Misi ke 1 (satu) adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi sektor unggulan daerah”

2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Untuk menetapkan tujuan, didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi, hal ini dimaksudkan agar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mampu mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah "Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak".

Untuk mendukung terwujudnya tujuan tersebut ditetapkan sasaran dan indikator sasaran, adapun sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni :

**Tujuan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2022**

| No | Tujuan | Indikator | Tahun 2022 | |
|----|---|----------------------------------|------------|------------------------|
| | | | Target (%) | Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 73,97 | Menunggu data dari BPS |

B. RENCANA KINERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, mempunyai sasaran strategis dan Indikator kinerja sebagai berikut :

**Sasaran Strategis dan Indikator kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

| No | Sasaran | Indikator | Tahun 2022 | |
|----|--|--|------------|---------------|
| | | | Target (%) | Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan | Persentase Peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik) | 65,37 % | 65,37 % |
| 2 | Meningkatnya pemenuhan hak anak | Persentase Pemenuhan hak anak | 12,66 % | 12,66 % |
| 3 | Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak | Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan | 37 % | 78,95 % |
| | | Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan | 50 % | 75,56 % |
| 4 | Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 82,30 % | 86,55 |

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Untuk tercapainya semua tujuan dan sasaran yang sudah dituangkan pada ketentuan Renstra tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan membuat kebijakan-kebijakan dan menyusun program dan kegiatan antara lain :

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan Kegiatan Antara Lain :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi keuangan perangkat daerah
- Administrasi kepegawaian perangkat daerah
- Administrasi umum perangkat daerah
- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

b. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan Kegiatan Antara Lain :

- Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ kota
- Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten / kota

c. Program Perlindungan Perempuan dengan Kegiatan Antara Lain :

- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota
- Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota
- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten / kota

d. Program peningkatan kualitas keluarga dengan Kegiatan Antara Lain:

- Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota

e. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan Kegiatan Antara Lain:

- Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota

f. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan Kegiatan Antara Lain:

- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah , non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota
- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota

g. Program perlindungan khusus anak dengan Kegiatan Antara Lain:

- Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota
- Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten / kota
- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud yang nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi guna menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan sanksi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2022 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMDP) Tahun 2021-2026. Berikut Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022:

**Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan | Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan | 65.37 % |
| | | Persentase Peningkatan Perempuan Produktif yang Berperan dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik) | 4.25 % |
| | | Persentase Perempuan yang Berperan dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga | 72.00 % |
| 2 | Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | Persentase Pemenuhan Hak Anak | 12.66 % |
| | | Persentase Tersedianya Data Profil Gender dan Anak | 40 % |
| | | Persentase Forum Anak yang Terbentuk | 12.66 % |
| 3 | Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak | Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Diselesaikan | 37 % |
| | | Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Diselesaikan | 50 % |
| | | Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Diselesaikan | 37 % |
| | | Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Diselesaikan | 50 % |
| 4 | Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP PD | 82.30 % |
| | | Nilai IKM Perangkat Daerah | 79,50 % |

Sekretaris dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Nilai IKM Perangkat Daerah | 79,5% |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Laporan Kinerja | 5 Dokumen |
| | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 5 Dokumen |
| | | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan baik | 100 % |
| | | Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik | 100 % |
| | | Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik | 100 % |
| | | Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik | 100 % |
| | | Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik | 100 % |

Sub bagian perencanaan, evaluasi dan keuangan

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terpenuhinya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja | 5 Dokumen |
| | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 2 Dokumen |
| | | Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah | 3 Dokumen |
| 2 | Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen laporan keuangan | 5 Dokumen |
| | | Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 1 Dokumen |

| | | |
|--|--|-----------|
| | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | 2 Dokumen |
| | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | 2 Dokumen |

Sub bagian umum dan kepegawaian

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya administrasi kepegawaian | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan baik | 100% |
| | | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | 2 Kegiatan |
| 2 | Meningkatnya unit kerja internal yang terlayani dengan baik | Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik | 100% |
| | | Jumlah pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 11 Jenis |
| | | Jumlah pemenuhan peralatan rumah tangga | 12 Jenis |
| | | Jumlah pemenuhan bahan logistik kantor | 30 Jenis |
| | | Jumlah pemenuhan cetakan dan penggandaan | 5 Jenis Cetakan 57302 Lembar Fotocopy |
| | | Jumlah pemenuhan bahan bacaan | 3 Jenis |
| | | Jumlah pemenuhan makan dan minum rapat yang tersedia | 514 Nasi Box dan 514 Snack Box |
| | | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi | 27 Kali |
| 3 | Meningkatnya unit kerja internal yang terlayani dengan baik | Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik | 100% |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 5 Rekening |
| | | Jumlah pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 10 Unit |
| | | Jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor | 23 orang |
| 4 | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik | Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik | 100% |
| | | Jumlah pemenuhan mebel | 5 Unit Filling Cabinet |
| | | Jumlah pemenuhan peralatan dan mesin lainnya | 1 unit AC, 1 unit Kulkas, 1 Unit LCD, 1Vacum cleaner, 4 unit notebook |
| 5 | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik | Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik | 100% |
| | | Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 2 Unit Mobil |
| | | Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor |
| | | jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 5 Unit |
| | | Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 3 Gedung |

BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kepala bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan | Persentase peningkatan perempuan produktif yang berperan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik); | 4.25% |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PUG dan peningkatan kapasitas penyusunan PPRG | 103 Peserta |
| | | Jumlah peserta pembinaan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 92 Peserta |
| | | Persentase perempuan yang berperan dalam peningkatan kualitas hidup keluarga | 72,00% |
| | | Jumlah keluarga yang dibina | 155 keluarga |

Kepala seksi pengarusutamaan gender

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PUG dan peningkatan kapasitas penyusunan PPRG | 103 Peserta |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti advokasi dan fasilitasi PUG dan PPRG | 63 Peserta |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PUG dan PPRG tingkat desa dan kelurahan | 40 Peserta |

Kepala seksi pemberdayaan perempuan

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|--|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan | Jumlah peserta pembinaan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 92 Peserta |
| | | Jumlah perempuan yang mengikuti bimbingan manajemen usaha bagi perempuan pekerja rumahan | 92 Perempuan Pekerja Rumahan |

Kepala seksi peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan | Jumlah keluarga yang dibina | 155 keluarga |
| | | Jumlah peserta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan keluarga dalam pengasuhan balita | 80 Peserta |
| | | Jumlah peserta sosialisasi peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan | 75 Peserta |

BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN SISTEM DATA

Kepala bidang pemenuhan hak anak dan sistem data

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|---------------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | Persentase tersedianya data profil gender dan anak | 40% |
| | | Jumlah data pendukung terkait profil gender dan anak | 34 data |

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Persentase forum anak yang terbentuk | 12,66% |
| | Jumlah Satuan Pendidikan yang didampingi menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak | 67 Satuan Pendidikan |
| | Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dalam pemenuhan hak anak | 35 Lembaga |

Kepala seksi pengarusutamaan hak anak

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|---------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | Jumlah Satuan Pendidikan yang didampingi menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak | 67 Satuan Pendidikan |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi KLA | 120 Peserta |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Satuan Pendidikan Ramah Anak | 67 Peserta |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi masjid ramah anak | 75 Peserta |

Kepala seksi peningkatan kualitas hidup anak dan partisipasi anak

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|---------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dalam pemenuhan hak anak | 35 Lembaga |
| | | Jumlah forum anak yang dibentuk/dibina | 18 Pembentukan |

| | | |
|--|---|-------------|
| | Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti sosialisasi pelayanan kesehatan ramah anak | 35 Peserta |
| | Jumlah peserta yang mengikuti Hari Anak Nasional | 150 Peserta |

Kepala seksi sistem data

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---------------------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | Jumlah data pendukung terkait profil gender dan anak | 34 data |
| | | Jumlah dokumen profil gender dan profil anak yang dibuat | 2 Dokumen |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek data terpilah profil anak tingkat kecamatan | 33 Peserta |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek data terpilah profil gender tingkat kecamatan | 33 Peserta |

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)

Kepala bidang perlindungan perempuan dan anak (ppa)

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak | Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan | 37% |
| | | Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan | 7 Lembaga |
| | | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan | 13 Kasus |

| | | |
|--|---|------------|
| | Jumlah lembaga yang mengikuti bimbingan pendampingan kekerasan dalam rumah tangga | 7 Lembaga |
| | Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan | 50% |
| | Persentase SDM P2TP2A yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan | 43,21% |
| | Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan | 17 Kasus |
| | Persentase SDM yang mengikuti kegiatan penguatan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | 4,22% |

Kepala seksi perlindungan anak

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak | Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan | 50% |
| | | Persentase SDM P2TP2A yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan | 43,21% |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis kapasitas P2TP2A dalam memberikan layanan perlindungan terhadap anak korban kekerasan | 95 Peserta |
| | | Persentase SDM yang mengikuti kegiatan penguatan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | 4,22% |
| | | Jumlah peserta bimbingan teknis sistem tata kelola pendampingan dan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. | 40 peserta relawan PATBM desa keluarahan |

Kepala seksi perlindungan perempuan

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|--|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak | Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan | 17 Kasus |
| | | Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang didampingi | 17 Kasus |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi undang - undang penyalahgunaan NAPZA, pornografi dan pencegahan perkawinan usia anak | 45 peserta |
| | | Persentase SDM yang mengikuti kegiatan penguatan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | 4,22% |
| | | Jumlah peserta bimbingan teknis sistem tata kelola pendampingan dan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. | 40 peserta relawan PATBM desa |

Kepala seksi pencegahan kekerasan terhadap perlindungan perempuan

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|--|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak | Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan | 7 Lembaga |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan | 120 Peserta |

| | | |
|--|--|---------------|
| | Persentase SDM P2TP2A yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan | 43,21% |
| | Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis kapasitas P2TP2A dalam memberikan layanan perlindungan terhadap anak korban kekerasan | 95 Peserta |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

Pencapaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi dan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

A.1. Pencapaian Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| | |
|----------------------------|--|
| TUJUAN RPJMD | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan |
| SASARAN 1 | Meningkatnya pemberdayaan dan pendapatan masyarakat |
| TUJUAN PD | Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| INDIKATOR TUJUAN PD | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) |

| No | Indikator | Target | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|---|--|------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 73,97 % | Menunggu data dari BPS | Menunggu data dari BPS |
| SASARAN PD | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan ❖ Meningkatnya pemenuhan hak anak ❖ Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak ❖ Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah | | | | |
| INDIKATOR SASARAN PD | | | | |
| No | Indikator | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Persentase Peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik) | 65,37 % | 65,37 % | 100 % |
| 2 | Persentase Pemenuhan hak anak | 12,66 % | 12,66 % | 100 % |
| 3 | Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan | 37 % | 78,95 % | 213,38 % |
| 4 | Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan | 50 % | 75,56 % | 151,12 % |
| 5 | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 82,30 % | 86,55 % | 100,16 % |

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja Tahun 2022 telah mencapai target yang ditentukan sebelumnya. Adapun rincian Indikator Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator tujuan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Target Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada Tahun 2022 sebesar 73,97 % dan belum terealisasi menunggu data dari BPS.

Persentase Peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik)

Persentase Peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik) merupakan indikator sasaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Persentase Peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik) memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Target Persentase Peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik) pada Tahun 2022 sebesar 37 % dan telah terealisasi sebesar 65,37 % sehingga telah tercapai target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 100 %.

Persentase Pemenuhan hak anak

Persentase Pemenuhan hak anak merupakan merupakan indikator sasaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Persentase Pemenuhan hak anak memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Target Persentase Pemenuhan hak anak pada Tahun 2022 sebesar 12,66 % dan telah terealisasi sebesar 12,66 % sehingga telah tercapai target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 100 %.

Persentase kasus kekerasan Perempuan yang diselesaikan

Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan merupakan indikator sasaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Target persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan pada Tahun 2022 sebesar 82,30 % dan telah terealisasi sebesar 86,55 % sehingga telah melebihi target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 100,16 %.

Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan

Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan merupakan indikator sasaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Target persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan pada Tahun 2022 sebesar 50 % dan telah terealisasi sebesar 75,56 % sehingga telah melebihi target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 151,12 %.

Nilai Sakip Perangkat Daerah

Nilai sakip perangkat daerah merupakan indikator sasaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nilai sakip perangkat daerah memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Target persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan pada Tahun 2022 sebesar 50 % dan telah terealisasi sebesar 75,56 % sehingga telah melebihi target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 151,12 %.

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja

**Perbandingan Realisasi Kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

| TUJUAN PD | | | |
|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|
| No | Indikator kinerja | REALISASI | |
| | | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). | 74,05 % | Menunggu data dari BPS |

| SASARAN PD | | | |
|-------------------|--|------------------|-------------|
| No | Indikator kinerja | REALISASI | |
| | | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Persentase Peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik) | - | 65,37 % |
| 2 | Persentase Pemenuhan hak anak | - | 12,66 % |
| 3 | Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan | 60 % | 78,95 % |
| 4 | Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan | 55,56 % | 75,56 % |
| 5 | Nilai Sakip Perangkat Daerah | - | 86,55 % |

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | FORMULA INDIKATOR | Realisasi PD (2022) | | Akhir Periode RPJMD/RENSTRA (2026) | |
|----|--|----------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | <p>IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan.</p> $1/3 (Ipar + IDM + linc-dist)$ <p>Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan linc-dist = Indeks distribusi pendapatan</p> | 73,97 % | Menunggu data dari BPS | 74,05 % | - |

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | FORMULA INDIKATOR | Realisasi PD (2022) | | Akhir Periode RPJMD/RENSTRA (2026) | |
|----|--|--|--|--|---------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. | Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan | Persentase peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik) | $\frac{\text{Jumlah perempuan yang bekerja}}{\text{Jumlah perempuan usia 20 - 64}} \times 100$ | 65,37 % | 65,37 % | 66,17% | - |
| | | Meningkatnya pemenuhan hak anak | Persentase pemenuhan hak anak | $\frac{\text{Jumlah Forum Anak yang terbentuk}}{\text{Jumlah desa di lamongan}} \times 100$ | 12,66 % | 12,66 % | 21,10% | - |
| | | Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak | Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan kasus kekerasan perempuan}} \times 100$ | 37 % | 78,95 % | 45 % | - |
| | | | Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan kasus kekerasan anak}} \times 100$ | 50 % | 75,56 % | 70 % | - |
| | | Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah | Nilai SAKIP DPPPA | Penilaian dari Inspektorat | 82,30 % | 86,55 % | 82.70 | - |

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | FORMULA INDIKATOR | Realisasi PD (2022) | | Realisasi Nasional | |
|----|---|--|--|--|---------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | Meningkatnya Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. | Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan | Persentase peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik) | $\frac{\text{Jumlah perempuan yang bekerja}}{\text{Jumlah perempuan usia 20 - 64}} \times 100$ | 65,37 % | 65,37 % | - | - |
| | | Meningkatnya pemenuhan hak anak | Persentase pemenuhan hak anak | $\frac{\text{Jumlah Forum Anak yang terbentuk}}{\text{Jumlah desa di lamongan}} \times 100$ | 12,66 % | 12,66 % | - | - |
| | | Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak | Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan kasus kekerasan perempuan}} \times 100$ | 37 % | 78,95 % | - | - |
| | | | Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan kasus kekerasan anak}} \times 100$ | 50 % | 75,56 % | - | - |
| | | Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah | Nilai SAKIP DPPPA | Penilaian dari Inspektorat | 82,30 % | 86,55 % | - | - |

A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Yang telah Dilakukan

Realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 telah memenuhi target yang ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam indikator sasaran program kerja. Adapun faktor yang mendukung secara umum keberhasilan realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 antara lain :

- a. Tersedianya jumlah aparatur yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan program kerja.
- b. Kualitas aparatur dilihat dari tingkat pendidikannya sudah cukup baik (rata-rata berpendidikan S1).
- c. Adanya struktur organisasi perangkat daerah dan pembagian tugas dari masing - masing bidang yang jelas.
- d. Adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin baik diantara masing - masing bidang.
- e. Program kerja berpedoman pada Tupoksi yang jelas, SOP dan SPM serta petunjuk operasional yang dapat dipahami segenap aparatur.
- f. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 yang berdedikasi dan memiliki integritas serta dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Capaian kinerja pada tahun 2022 berdasarkan indikator tujuan sebagai berikut:

- a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan. Target yang telah ditetapkan yaitu 73,97 % dan belum terealisasi menunggu data dari BPS.

Capaian kinerja pada tahun 2022 berdasarkan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Persentase Peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik) merupakan indikator sasaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Persentase Peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik) memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Target Persentase Peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik) pada Tahun 2022 sebesar 65,37 % dan telah terealisasi sebesar 65,37 % sehingga telah tercapai target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 100 %.
- b. Persentase Pemenuhan hak anak merupakan merupakan indikator sasaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Persentase Pemenuhan hak anak memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Target Persentase Pemenuhan hak anak pada Tahun 2022 sebesar 12,66 % dan telah terealisasi sebesar 12,66 % sehingga telah tercapai target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 100 %.
- c. Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan merupakan indikator sasaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Target persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan pada Tahun 2022 sebesar 37 % dan telah terealisasi sebesar 78,95 % sehingga telah melebihi target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 213,38 %.
- d. Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan merupakan indikator sasaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Target persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan pada Tahun 2022 sebesar 50 % dan telah terealisasi sebesar 75,56 % sehingga telah melebihi target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 151,12 %.

- e. Nilai sakin perangkat daerah merupakan indikator sasaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nilai sakin perangkat daerah memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Target Nilai sakin perangkat daerah pada Tahun 2022 sebesar 82,30 % dan telah terealisasi sebesar 86,55 % sehingga telah melebihi target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 105,16 %.

PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Tingkat partisipasi PD dalam pembuatan dokumen PPRG belum maksimal
- b. Belum optimalnya peran perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) ditingkat Desa/Kelurahan dalam membantu menangani anak korban kekerasan
- c. Masih adanya stigma terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sehingga menghambat korban dalam mengakses bantuan dan layanan.
- d. Belum tersedianya Psikolog klinis dan Psikiater di Kabupaten Lamongan untuk pemeriksaan Visum et-Repertum Psychiatricum (VeRp) bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan.
- e. Penyusunan Dokumen Profil Gender dan Anak belum maksimal.
- f. Pembentukan Forum Anak yang belum maksimal dan kurang pahami masyarakat terhadap Forum Anak.

SOLUSI

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Mengoptimalkan koordinasi dengan PD dalam pembuatan dokumen PPRG
- b. Menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait, seperti organisasi perangkat daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga/Organisasi Masyarakat.

- c. Melakukan inovasi dan memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan.
- d. Melakukan Refreshment terkait pemahaman dalam pembelajaran system satu data lamongan.
- e. Melakukan penerapan indikator Kabupaten Layak Anak dalam kegiatan sehari-hari pemerintah kabupaten Lamongan.

A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan program kerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dan dituangkan dalam perencanaan strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang penjabaran operasional rencana tahunannya yang tertuang dalam dokumen RENJA dengan berpedoman RPJMD Kabupaten Lamongan dan sesuai dengan VISI dan MISI Bupati Lamongan Tahun 2021-2026. Pada penyusunannya juga memperhatikan tantangan dan potensi yang ada di wilayah. Sehubungan dengan hal dimaksud dalam penyusunan rencana kegiatan didasarkan memfokuskan terhadap tantangan yang dihadapi dan mengoptimalkan potensi di wilayah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah salah satu perangkat daerah berdasarkan kewenangannya adalah penyelenggara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan perempuan perlindungan anak.

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada dengan mengoptimalkan efektifitas koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder yang ada di Kabupaten dalam mendukung setiap program pembangunan di wilayah Kabupaten yang diarahkan dalam pencapaian visi dan misi.

Analisis Efisiensi Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | KINERJA | | ANGGARAN | | | EFEKTIF | EFISIEN | KETERANGAN ≤ 90% |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------|---------|--|
| | | TARGET | REALISASI | PAGU | REALISASI | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | NILAI IKM PERANGKAT DAERAH | 79,50 % | 89,50 % | 3.989.105.000 | 3.788.799.410 | 94,98 | √ | √ | Tidak terserap karna Realisasi berdasarkan kebutuhan |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 26.300.000 | 26.130.000 | 99,35 | √ | √ | |
| Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 13.000.000 | 12.830.000 | 98,69 | √ | √ | |
| Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 13.300.000 | 13.300.000 | 100 | √ | √ | |
| Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah dokumen laporan keuangan | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 2.688.049.000 | 2.525.829.899 | 93,97 | √ | √ | Tidak terserap karna Realisasi berdasarkan kebutuhan |
| Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.661.749.000 | 2.499.745.219 | 93,91 | √ | √ | Tidak terserap karna Realisasi berdasarkan kebutuhan |
| Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 13.000.000 | 12.896.160 | 99,20 | √ | √ | |

| URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | KINERJA | | ANGGARAN | | | EFEKTIF | EFISIEN | KETERANGAN ≤ 90% |
|---|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------|---------|---------|---------------------|
| | | TARGET | REALISASI | PAGU | REALISASI | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 13.300.000 | 13.188.520 | 99,16 | √ | √ | |
| Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan baik | 100% | 100% | 22.500.000 | 22.140.000 | 98,40 | √ | √ | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 22.500.000 | 22.140.000 | 98,40 | √ | √ | |
| Administrasi umum perangkat daerah | Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik | 100% | 100% | 165.749.300 | 165.446.056 | 99,82 | √ | √ | |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 11 Jenis | 11 Jenis | 15.999.600 | 15.999.600 | 100 | √ | √ | |
| Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah pemenuhan peralatan rumah tangga | 12 Jenis | 12 Jenis | 17.998.300 | 17.998.300 | 100 | √ | √ | |
| Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah pemenuhan bahan logistik kantor | 30 Jenis | 30 Jenis | 30.019.500 | 30.019.500 | 100 | √ | √ | |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah pemenuhan cetakan dan penggandaan | 5 Jenis Cetakan 57302 Lembar Fotocopy | 5 Jenis Cetakan 57302 Lembar Fotocopy | 24.990.500 | 24.990.500 | 100 | √ | √ | |

| URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | KINERJA | | ANGGARAN | | | EFEKTIF | EFISIEN | KETERANGAN ≤ 90% |
|---|---|---|---|-------------------|-------------------|--------------|---------|---------|---------------------|
| | | TARGET | REALISASI | PAGU | REALISASI | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah pemenuhan bahan bacaan | 3 Jenis | 3 Jenis | 7.200.000 | 7.140.000 | 99,17 | √ | √ | |
| Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah pemenuhan makan dan minum rapat yang tersedia | 514 Nasi Box dan 514 Snack Box | 514 Nasi Box dan 514 Snack Box | 69.541.400 | 69.298.156 | 99,65 | √ | √ | |
| | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi | 27 Kali | 27 Kali | | | | √ | √ | |
| Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik | 100% | 100% | 94.360.700 | 94.160.700 | 99,79 | √ | √ | |
| Pengadaan mebel | Jumlah pemenuhan mebel | 5 Unit Filling Cabinet | 5 Unit Filling Cabinet | 24.935.000 | 24.935.000 | 100 | √ | √ | |
| Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah pemenuhan peralatan dan mesin lainnya | 1 unit AC, 1 Unit Kulkas, 1 Unit LCD, 1 Unit layar LCD Proyekto 1 Vacum cleaner, 4 unit notebook | 1 unit AC, 1 Unit Kulkas, 1 Unit LCD, 1 Unit layar LCD Proyektor1 Vacum cleaner, 4 unit notebook | 69.425.700 | 69.225.700 | 99,71 | √ | √ | |

| URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | KINERJA | | ANGGARAN | | | EFEKTIF | EFISIEN | KETERANGAN ≤ 90% |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|---------|---|
| | | TARGET | REALISASI | PAGU | REALISASI | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik | 100% | 100% | 600.656.000 | 564.511.055 | 93,98 | √ | √ | Tidak terserap karena Realisasi berdasarkan kebutuhan |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 5 Rekening | 5 Rekening | 100.000.000 | 74.774.695 | 74,77 | √ | √ | Tidak terserap karena Realisasi berdasarkan kebutuhan |
| Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 10 Unit | 10 Unit | 10.000.000 | 9.800.000 | 98,00 | √ | √ | |
| Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor | 23 orang | 23 orang | 490.656.000 | 479.936.360 | 97,82 | √ | √ | |
| Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik | 100% | 100% | 391.490.000 | 390.581.700 | 99,77 | √ | √ | |
| Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 2 Unit Mobil | 2 Unit Mobil | 33.144.000 | 32.800.000 | 98,96 | √ | √ | |
| Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor | 2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor | 18.036.000 | 17.932.800 | 99,43 | √ | √ | |
| Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 5 Unit | 5 Unit | 8.310.000 | 8.201.000 | 98,69 | √ | √ | |

| URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | KINERJA | | ANGGARAN | | | EFEKTIF | EFISIEN | KETERANGAN ≤ 90% |
|--|--|----------|-----------|-------------|-------------|-------|---------|---------|---------------------|
| | | TARGET | REALISASI | PAGU | REALISASI | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 3 Gedung | 3 Gedung | 332.000.000 | 331.647.900 | 99,89 | √ | √ | |

| URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | KINERJA | | ANGGARAN | | | EFEKTIF | EFISIEN | KETERANGAN ≤ 90% |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|---------|---------|---------------------|
| | | TARGET | REALISASI | PAGU | REALISASI | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN; | PERSENTASE PENINGKATAN PEREMPUAN PRODUKTIF YANG BERPERAN DALAM PEMBANGUNAN (EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK); | 4.25% | 4.25% | 135.380.000 | 134.660.000 | 99,47 | √ | √ | |
| Pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ kota | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PUG dan peningkatan kapasitas penyusunan PPRG | 103 Peserta | 103 Peserta | 67.690.000 | 67.690.000 | 100 | √ | √ | |
| Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah peserta yang mengikuti advokasi dan fasilitasi PUG dan PPRG | 63 Peserta x 2 kegiatan | 63 Peserta x 2 kegiatan | 67.690.000 | 67.690.000 | 100 | √ | √ | |

| URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | KINERJA | | ANGGARAN | | | EFEKTIF | EFISIEN | KETERANGAN ≤ 90% |
|---|--|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|---------|------------------|
| | | TARGET | REALISASI | PAGU | REALISASI | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PUG dan PPRG tingkat desa dan kelurahan | 40 Peserta | 40 Peserta | | | | √ | √ | |
| Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten / kota | Jumlah peserta pembinaan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 92 Peserta | 92 Peserta | 67.690.000 | 66.970.000 | 98,94 | √ | √ | |
| Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | Jumlah perempuan yang mengikuti bimbingan manajemen usaha bagi perempuan pekerja rumahan | 92 Perempuan Pekerja Rumahan | 92 Perempuan Pekerja Rumahan | 67.690.000 | 66.970.000 | 98,94 | √ | √ | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | PERSENTASE KASUS KEKERASAN PEREMPUAN YANG DISELESAIKAN | 37 % | 78,95 % | 193.633.100 | 193.633.100 | 100 | √ | √ | |
| Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota | Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan | 7 Lembaga | 7 Lembaga | 55.682.600 | 55.682.600 | 100 | √ | √ | |
| Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan | 120 Peserta | 120 Peserta | 55.682.600 | 55.682.600 | 100 | √ | √ | |

| URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | KINERJA | | ANGGARAN | | | EFEKTIF | EFISIEN | KETERANGAN ≤ 90% |
|---|---|---------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|---------|---------|------------------|
| | | TARGET | REALISASI | PAGU | REALISASI | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan | 13 Kasus | 30 Kasus | 87.419.000 | 87.419.000 | 100 | √ | √ | |
| Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang didampingi | 13 Kasus | 38 Kasus | 87.419.000 | 87.419.000 | 100 | √ | √ | |
| Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten / kota | Jumlah lembaga yang mengikuti bimbingan pendampingan kekerasan dalam rumah tangga | 7 Lembaga | 7 Lembaga | 50.531.500 | 50.531.500 | 100 | √ | √ | |
| Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota | Jumlah peserta yang mengikuti pendampingan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) | 200 Peserta | 200 Peserta | 50.531.500 | 50.531.500 | 100 | √ | √ | |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | PERSENTASE PEREMPUAN YANG BERPERAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP KELUARGA | 72,00% | 72,00% | 96.011.000 | 95.992.000 | 99,98 | √ | √ | |

| URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | KINERJA | | ANGGARAN | | | EFEKTIF | EFISIEN | KETERANGAN ≤ 90% |
|---|---|--------------|--------------|-------------------|-------------------|------------|---------|---------|------------------|
| | | TARGET | REALISASI | PAGU | REALISASI | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah keluarga yang dibina | 155 keluarga | 155 keluarga | 96.011.000 | 95.992.000 | 99,98 | √ | √ | |
| Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota | Jumlah peserta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan keluarga dalam pengasuhan balita | 80 Peserta | 80 Peserta | 96.011.000 | 95.992.000 | 99,98 | √ | √ | |
| | Jumlah peserta sosialisasi peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan | 75 peserta | 75 peserta | | | | √ | √ | |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | PERSENTASE TERSEDIA NYA DATA PROFIL GENDER DAN ANAK | 40% | 40% | 40.370.000 | 40.370.000 | 100 | √ | √ | |
| Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah data pendukung terkait profil gender dan anak | 34 Data | 34 Data | 40.370.000 | 40.370.000 | 100 | √ | √ | |
| Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota | Jumlah dokumen profil gender dan profil anak yang dibuat | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 40.370.000 | 40.370.000 | 100 | √ | √ | |

| URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | KINERJA | | ANGGARAN | | | EFEKTIF | EFISIEN | KETERANGAN ≤ 90% |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|---------|------------------|
| | | TARGET | REALISASI | PAGU | REALISASI | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek data terpilah profil anak tingkat kecamatan | 33 Peserta | 33 Peserta | | | | √ | √ | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek data terpilah profil gender tingkat kecamatan | 33 Peserta | 33 Peserta | | | | √ | √ | |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | PERSENTASE FORUM ANAK YANG TERBENTUK | 12,66% | 12,66% | 214.011.000 | 213.941.898 | 99,97 | √ | √ | |
| Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah , non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota | Jumlah Satuan Pendidikan yang didampingi menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak | 67 Satuan Pendidikan | 67 Satuan Pendidikan | 109.011.000 | 108.956.898 | 99,95 | √ | √ | |
| Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota | Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi KLA | 120 Peserta | 120 Peserta | 109.011.000 | 108.956.898 | 99,95 | √ | √ | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Satuan Pendidikan Ramah Anak | 67 Peserta | 67 Peserta | | | | √ | √ | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi masjid ramah anak | 75 Peserta | 75 Peserta | | | | √ | √ | |

| URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | KINERJA | | ANGGARAN | | | EFEKTIF | EFISIEN | KETERANGAN ≤ 90% |
|---|---|----------------|----------------|-------------|-------------|-------|---------|---------|------------------|
| | | TARGET | REALISASI | PAGU | REALISASI | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota | Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dalam pemenuhan hak anak | 35 Lembaga | 35 Lembaga | 105.000.000 | 104.985.000 | 99,99 | √ | √ | |
| Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah forum anak yang dibentuk/dibina | 18 Pembentukan | 18 Pembentukan | 105.000.000 | 104.985.000 | 99,99 | √ | √ | |
| | Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti sosialisasi pelayanan kesehatan ramah anak | 35 Peserta | 35 Peserta | | | | √ | √ | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti Hari Anak Nasional | 150 peserta | 150 peserta | | | | √ | √ | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | PERSENTASE KASUS KEKERASAN ANAK YANG DISELESAIKAN | 50 % | 75,56 % | 189.285.000 | 184.070.000 | 97,24 | √ | √ | |
| Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota | Persentase SDM P2TP2A yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan | 43,21% | 43,21% | 51.011.000 | 51.011.000 | 100 | √ | √ | |

| URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | KINERJA | | ANGGARAN | | | EFEKTIF | EFISIEN | KETERANGAN ≤ 90% |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|---------|--|
| | | TARGET | REALISASI | PAGU | REALISASI | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis kapasitas P2TP2A dalam memberikan layanan perlindungan terhadap anak korban kekerasan | 95 Peserta | 95 Peserta | 51.011.000 | 51.011.000 | 100 | √ | √ | |
| Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten / kota | Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan | 17 Kasus | 34 Kasus | 113.274.000 | 108.074.000 | 95,41 | √ | √ | Tidak terserap karna Spesifikasi di DPA tidak sesuai dengan kegiatan pendampingan anak |
| Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota. | Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang didampingi | 17 Kasus | 45 Kasus | 88.274.000 | 83.274.000 | 94,34 | √ | √ | Tidak terserap karna Spesifikasi di DPA tidak sesuai dengan kegiatan pendampingan anak |
| Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi undang - undang penyalahgunaan NAPZA, pornografi dan pencegahan perkawinan usia anak | 45 Peserta | 45 Peserta | 25.000.000 | 24.800.000 | 99,20 | √ | √ | |

| URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | KINERJA | | ANGGARAN | | | EFEKTIF | EFISIEN | KETERANGAN ≤ 90% |
|--|---|--|--|------------|------------|-------|---------|---------|------------------|
| | | TARGET | REALISASI | PAGU | REALISASI | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota | Persentase SDM yang mengikuti kegiatan penguatan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | 4,22% | 4,22% | 25.000.000 | 24.985.000 | 99,94 | √ | √ | |
| Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten /kota | Jumlah peserta bimbingan teknis sistem tata kelola pendampingan dan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. | 40 Peserta relawan PATBM Desa | 40 Peserta relawan PATBM Desa | 25.000.000 | 24.985.000 | 99,94 | √ | √ | |

A.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.989.105.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.788.799.410,- atau sebesar 94,98 % adapun rincian kegiatan penggunaan anggaran sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi Rp. 26.300.000 dipergunakan untuk memenuhi perencanaan dan evaluasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 26.130.000 atau 99,35 % dan fisik 100 %.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi Rp. 13.000.000 dipergunakan untuk memenuhi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 12.830.000 atau 98,69 % dan fisik 100 %.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi Rp. 13.300.000 dipergunakan untuk memenuhi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 13.300.000 atau 100 % dan fisik 100 %.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi Rp. 2.688.049.000 dipergunakan untuk memenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.525.829.899 atau 93,97 % dan fisik 100 %.
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi Rp. 2.661.749.000 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.499.745.219 atau 93,91 % dan fisik 100 %.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi Rp. 13.000.000 dipergunakan untuk memenuhi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 12.896.160 atau 99,20 % dan fisik 100 %.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan alokasi Rp. 13.300.000 dipergunakan untuk memenuhi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 13.188.520 atau 99,15 % dan fisik 100 %.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi Rp. 22.500.000 dipergunakan untuk memenuhi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 22.140.000 atau 98,40 % dan fisik 100 %.
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi 22.500.000 dipergunakan untuk memenuhi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 22.140.000 atau 98,40 % dan fisik 100 %.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi Rp. 165.749.300 dipergunakan untuk memenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 165.446.056 atau 99,82 % dan fisik 100 %.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi Rp. 15.999.600 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 15.999.600 atau 100 % dan fisik 100 %.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi Rp. 17.998.300 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 17.998.300 atau 100 % dan fisik 100 %.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi Rp. 30.019.500 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 30.019.500 atau 100 % dan fisik 100 %.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi Rp. 24.990.500 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 24.990.500 atau 100 % dan fisik 100 %.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi Rp. 7.200.000 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 7.140.000 atau 99,17 % dan fisik 100 %.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi Rp. 69.541.400 dipergunakan untuk memenuhi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 69.298.156 atau 99,65 % dan fisik 100 %.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi Rp. 94.360.700 dipergunakan untuk memenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 94.160.700 atau 99,79 % dan fisik 100 %.
- Pengadaan Mebel dengan alokasi Rp. 24.935.000 dipergunakan untuk memenuhi Pengadaan Mebel. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 24.935.000 atau 100 % dan fisik 100 %.
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi Rp. 69.425.700 dipergunakan untuk memenuhi Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 69.225.700 atau 99,71 dan fisik 100 %
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi Rp. 600.656.000 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 564.511.055 atau 93,98 % dan fisik 100 %.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi Rp. 100.000.000 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 74.774.695 atau 74,77 % dan fisik 100 %.
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi Rp. 10.000.000 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.800.000 atau 98,00 % dan fisik 100 %.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi Rp. 490.656.000 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 479.936.360 atau 97,82 % dan fisik 100 %.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi Rp. 391.490.000 dipergunakan untuk memenuhi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 390.581.700 atau 99,77 % dan fisik 100 %.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi Rp. 33.144.000 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 32.800.000 atau 98,96 % dan fisik 100 %.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi Rp. 18.036.000 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 17.932.000 atau 99,43 % dan fisik 100 %.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi Rp. 8.310.000 dipergunakan untuk memenuhi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 8.201.000 atau 99,89 % dan fisik 100 %.
- Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi Rp. 332.000.000 dipergunakan untuk memenuhi Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 331.647.900 atau 99,89 % dan fisik 100 %.

2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 135.380.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 134.660.000 atau sebesar 99,47 % adapun rincian kegiatan penggunaan anggaran sebagai berikut :

- a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 67.690.000 dipergunakan untuk memenuhi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 67.690.000 atau 100 % dan fisik 100 %.
 - Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan alokasi Rp. 67.690.000 dipergunakan untuk memenuhi Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 67.690.000 atau 100 % dan fisik 100 %.
- b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 67.690.000 dipergunakan untuk memenuhi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 66.970.000 atau 98,94 % dan fisik 100 %.
 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan alokasi Rp. 67.690.000 dipergunakan untuk memenuhi Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 66.970.000 atau 98,94 % dan fisik 100 %.

3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 193.633.100 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 193.633.100 atau sebesar 100 % adapun rincian kegiatan penggunaan anggaran sebagai berikut :

- a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 55.682.600 dipergunakan untuk memenuhi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 55.682.600 atau 100 % dan fisik 100 %.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 55.682.600 dipergunakan untuk memenuhi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 55.682.600 atau 100 % dan fisik 100 %.
- b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 87.419.000 dipergunakan untuk memenuhi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 87.419.000 atau 100 % dan fisik 100 %.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota dengan alokasi Rp. 87.419.000 dipergunakan untuk memenuhi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 87.419.000 atau 100 % dan fisik 100 %.
- c. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 50.531.500 dipergunakan untuk memenuhi Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 50.531.500 atau 100 % dan fisik 100 %.
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp.50.531.500 dipergunakan untuk memenuhi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 50.531.500 atau 100 % dan fisik 100 %.

4. **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 96.011.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 95.992.000 atau sebesar 99,98 % adapun rincian kegiatan penggunaan anggaran sebagai berikut :
- a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 96.011.000 dipergunakan untuk memenuhi Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 95.992.000 atau sebesar 99,98 % dan fisik 100 %.
 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 96.011.000 dipergunakan untuk memenuhi Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 95.992.000 atau sebesar 99,98 % dan fisik 100 %.
5. **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.370.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.370.000 atau sebesar 100 % adapun rincian kegiatan penggunaan anggaran sebagai berikut :
- a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota dengan alokasi Rp. 40.370.000 dipergunakan untuk memenuhi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 40.370.000 atau 100 % dan fisik 100 %.
 - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 40.370.000 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 40.370.000 atau 100 % dan fisik 100 %.

- 6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 214.011.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 213.941.898 atau sebesar 99,97 % adapun rincian kegiatan penggunaan anggaran sebagai berikut :
- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah , Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 109.011.000 dipergunakan untuk memenuhi Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah , Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 108.956.898 atau 99,95 % dan fisik 100 %.
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 109.011.000 dipergunakan untuk memenuhi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 108.956.898 atau 99,95 % dan fisik 100 %.
 - b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota dengan alokasi Rp. 105.000.000 dipergunakan untuk memenuhi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 104.985.000 atau 99,99 % dan fisik 100 %.
 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 105.000.000 dipergunakan untuk memenuhi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 104.985.000 atau 99,99 % dan fisik 100 %.

7. **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 189.285.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 184.070.000 atau sebesar 97,24 % adapun rincian kegiatan penggunaan anggaran sebagai berikut :
- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 51.011.000 dipergunakan untuk memenuhi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 51.011.000 atau 100 % dan fisik 100 %.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 51.011.000 dipergunakan untuk memenuhi Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 51.011.000 atau 100 % dan fisik 100 %.
 - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dengan alokasi Rp. 113.274.000 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 108.074.000 atau 95,41 % dan fisik 100 %.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota. dengan alokasi Rp. 88.274.000 dipergunakan untuk memenuhi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 83.274.000 atau 94,34 % dan fisik 100 %.
 - Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 25.000.000 dipergunakan untuk memenuhi Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 24.800.000 atau 99,20 % dan fisik 100 %.

- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 25.000.000 dipergunakan untuk memenuhi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 24.985.000 atau 99,94 % dan fisik 100 %.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 25.000.000 dipergunakan untuk memenuhi Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 24.985.000 atau 99,94 % dan fisik 100 %.

Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2022

| URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | NILAI IKM PERANGKAT DAERAH | 79,50 | 89,50 | 100 % |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100 % |
| Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % |
| Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 % |
| Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah dokumen laporan keuangan | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100 % |
| Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |

| URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|--|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % |
| Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % |
| Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan baik | 100% | 100% | 100 % |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 100 % |
| Administrasi umum perangkat daerah | Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik | 100% | 100% | 100 % |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 11 Jenis | 11 Jenis | 100 % |
| Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah pemenuhan peralatan rumah tangga | 12 Jenis | 12 Jenis | 100 % |
| Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah pemenuhan bahan logistik kantor | 30 Jenis | 30 Jenis | 100 % |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah pemenuhan cetakan dan penggandaan | 5 Jenis Cetakan 57302 Lembar Fotocopy | 5 Jenis Cetakan 57302 Lembar Fotocopy | 100 % |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah pemenuhan bahan bacaan | 3 Jenis | 3 Jenis | 100 % |
| Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah pemenuhan makan dan minum rapat yang tersedia | 514 Nasi Box dan 514 Snack Box | 514 Nasi Box dan 514 Snack Box | 100 % |

| URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|--|--|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi | 27 Kali | 27 Kali | 100 % |
| Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik | 100% | 100% | 100 % |
| Pengadaan mebel | Jumlah pemenuhan mebel | 5 Unit Filling Cabinet | 5 Unit Filling Cabinet | 100 % |
| Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah pemenuhan peralatan dan mesin lainnya | 1 unit AC, 1 Unit Kulkas, 1 Unit LCD, 1 Unit layar LCD Proyektor 1 Vacum cleaner, 4 unit notebook | 1 unit AC, 1 Unit Kulkas, 1 Unit LCD, 1 Unit layar LCD Proyektor 1 Vacum cleaner, 4 unit notebook | 100 % |
| Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik | 100% | 100% | 100 % |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 5 Rekening | 5 Rekening | 100 % |
| Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 10 Unit | 10 Unit | 100 % |
| Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor | 23 orang | 23 orang | 100 % |
| Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik | 100% | 100% | 100 % |

| URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|--|--|---|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 2 Unit Mobil | 2 Unit Mobil | 100 % |
| Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor | 2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor | 100 % |
| Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 5 Unit | 5 Unit | 100 % |
| Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 3 Gedung | 3 Gedung | 100 % |

| URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|--|----------------|----------------|---------|
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN; | PERSENTASE PENINGKATAN PEREMPUAN PRODUKTIF YANG BERPERAN DALAM PEMBANGUNAN (EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK); | 4.25% | 4.25% | 100 % |
| Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ kota | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PUG dan peningkatan kapasitas penyusunan PPRG | 103 Peserta | 103 Peserta | 100 % |

| URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah peserta yang mengikuti advokasi dan fasilitasi PUG dan PPRG | 63 Peserta x 2 kegiatan | 63 Peserta x 2 kegiatan | 100 % |
| | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PUG dan PPRG tingkat desa dan kelurahan | 40 Peserta | 40 Peserta | 100 % |
| Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten / kota | Jumlah peserta pembinaan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 92 Peserta | 92 Peserta | 100 % |
| Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | Jumlah perempuan yang mengikuti bimbingan manajemen usaha bagi perempuan pekerja rumahan | 92 Perempuan Pekerja Rumahan | 92 Perempuan Pekerja Rumahan | 100 % |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | PERSENTASE KASUS KEKERASAN PEREMPUAN YANG DISELESAIKAN | 37 % | 78,95 % | 100 % |
| Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota | Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan | 7 Lembaga | 7 Lembaga | 100 % |
| Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan | 120 Peserta | 120 Peserta | 100 % |

| URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---------------|---------------|--------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan | 13 Kasus | 30 Kasus | 100 % |
| Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang didampingi | 13 Kasus | 38 Kasus | 100 % |
| Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten / kota | Jumlah lembaga yang mengikuti bimbingan pendampingan kekerasan dalam rumah tangga | 7 Lembaga | 7 Lembaga | 100 % |
| Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota | Jumlah peserta yang mengikuti pendampingan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) | 200 Peserta | 200 Peserta | 100 % |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | PERSENTASE PEREMPUAN YANG BERPERAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP KELUARGA | 72,00% | 72,00% | 100 % |
| Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah keluarga yang dibina | 155 keluarga | 155 keluarga | 100 % |

| URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---------------|---------------|--------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota | Jumlah peserta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan keluarga dalam pengasuhan balita | 80 Peserta | 80 Peserta | 100 % |
| | Jumlah peserta sosialisasi peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan | 75 peserta | 75 peserta | 100 % |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | PERSENTASE TERSEDINYA DATA PROFIL GENDER DAN ANAK | 40% | 40% | 100 % |
| Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah data pendukung terkait profil gender dan anak | 34 Data | 34 Data | 100 % |
| Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota | Jumlah dokumen profil gender dan profil anak yang dibuat | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % |
| | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek data terpilah profil anak tingkat kecamatan | 33 Peserta | 33 Peserta | 100 % |
| | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek data terpilah profil gender tingkat kecamatan | 33 Peserta | 33 Peserta | 100 % |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | PERSENTASE FORUM ANAK YANG TERBENTUK | 12,66% | 12,66% | 100 % |

| URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah , non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota | Jumlah Satuan Pendidikan yang didampingi menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak | 67 Satuan Pendidikan | 67 Satuan Pendidikan | 100 % |
| Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota | Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi KLA | 120 Peserta | 120 Peserta | 100 % |
| | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Satuan Pendidikan Ramah Anak | 67 Peserta | 67 Peserta | 100 % |
| | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi masjid ramah anak | 75 Peserta | 75 Peserta | 100 % |
| Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota | Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dalam pemenuhan hak anak | 35 Lembaga | 35 Lembaga | 100 % |
| Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah forum anak yang dibentuk/dibina | 18 Pembentukan | 18 Pembentukan | 100 % |
| | Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti sosialisasi pelayanan kesehatan ramah anak | 35 Peserta | 35 Peserta | 100 % |
| | Jumlah peserta yang mengikuti Hari Anak Nasional | 150 peserta | 150 peserta | 100 % |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | PERSENTASE KASUS KEKERASAN ANAK YANG DISELESAIKAN | 50 % | 75,56 % | 100 % |

| URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota | Persentase SDM P2TP2A yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan | 43,21% | 43,21% | 100 % |
| Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis kapasitas P2TP2A dalam memberikan layanan perlindungan terhadap anak korban kekerasan | 95 Peserta | 95 Peserta | 100 % |
| Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten / kota | Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan | 17 Kasus | 34 Kasus | 100 % |
| Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota. | Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang didampingi | 17 Kasus | 45 Kasus | 100 % |
| Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi undang - undang penyalahgunaan NAPZA, pornografi dan pencegahan perkawinan usia anak | 45 Peserta | 45 Peserta | 100 % |
| Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota | Persentase SDM yang mengikuti kegiatan penguatan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | 4,22% | 4,22% | 100 % |

| URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten /kota | Jumlah peserta bimbingan teknis sistem tata kelola pendampingan dan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. | 40 Peserta relawan PATBM Desa | 40 Peserta relawan PATBM Desa | 100 % |

Dari ke 7 (tujuh) program utama yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 realisasi pencapaian kinerja program telah mencapai 100 %.

B. REALISASI ANGGARAN

| Uraian | Anggaran | Realisasi | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | Jumlah | Jumlah | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <u>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</u> | <u>4.857.795.100</u> | <u>4.651.466.408</u> | <u>95,75</u> |
| <u>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</u> | <u>4.857.795.100</u> | <u>4.651.466.408</u> | <u>95,75</u> |
| <u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</u> | <u>3.989.105.000</u> | <u>3.788.799.410</u> | <u>94,98</u> |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 26.300.000 | 26.130.000 | 99,35 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 13.000.000 | 12.830.000 | 98,69 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13.300.000 | 13.300.000 | 100,00 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.688.049.000 | 2.525.829.899 | 93,97 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.661.749.000 | 2.499.745.219 | 93,91 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 13.000.000 | 12.896.160 | 99,20 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 13.300.000 | 13.188.520 | 99,16 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 22.500.000 | 22.140.000 | 98,40 |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 22.500.000 | 22.140.000 | 98,40 |

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 165.749.300 | 165.446.056 | 99,82 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 15.999.600 | 15.999.600 | 100,00 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 17.998.300 | 17.998.300 | 100,00 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 30.019.500 | 30.019.500 | 100,00 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 24.990.500 | 24.990.500 | 100,00 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 7.200.000 | 7.140.000 | 99,17 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 69.541.400 | 69.298.156 | 99,65 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 94.360.700 | 94.160.700 | 99,79 |
| Pengadaan Mebel | 24.935.000 | 24.935.000 | 100,00 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 69.425.700 | 69.225.700 | 99,71 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 600.656.000 | 564.511.055 | 93,98 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100.000.000 | 74.774.695 | 74,77 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.000.000 | 9.800.000 | 98,00 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 490.656.000 | 479.936.360 | 97,82 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 391.490.000 | 390.581.700 | 99,77 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 33.144.000 | 32.800.000 | 98,96 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 18.036.000 | 17.932.800 | 99,43 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8.310.000 | 8.201.000 | 98,69 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 332.000.000 | 331.647.900 | 99,89 |
| <u>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</u> | <u>135.380.000</u> | <u>134.660.000</u> | <u>99,47</u> |
| Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | 67.690.000 | 67.690.000 | 100,00 |
| Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | 67.690.000 | 67.690.000 | 100,00 |
| Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 67.690.000 | 66.970.000 | 98,94 |
| Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 67.690.000 | 66.970.000 | 98,94 |

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| <u>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</u> | <u>193.633.100</u> | <u>193.633.100</u> | <u>100,00</u> |
| Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 55.682.600 | 55.682.600 | 100,00 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 55.682.600 | 55.682.600 | 100,00 |
| Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 87.419.000 | 87.419.000 | 100,00 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 87.419.000 | 87.419.000 | 100,00 |
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 50.531.500 | 50.531.500 | 100,00 |
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 50.531.500 | 50.531.500 | 100,00 |
| <u>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</u> | <u>96.011.000</u> | <u>95.992.000</u> | <u>99,98</u> |
| Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 96.011.000 | 95.992.000 | 99,98 |
| Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 96.011.000 | 95.992.000 | 99,98 |
| <u>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</u> | <u>40.370.000</u> | <u>40.370.000</u> | <u>100,00</u> |
| Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 40.370.000 | 40.370.000 | 100,00 |
| Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | 40.370.000 | 40.370.000 | 100,00 |
| <u>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</u> | <u>214.011.000</u> | <u>213.941.898</u> | <u>99,97</u> |
| Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 109.011.000 | 108.956.898 | 99,95 |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 109.011.000 | 108.956.898 | 99,95 |

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 105.000.000 | 104.985.000 | 99,99 |
| Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 105.000.000 | 104.985.000 | 99,99 |
| <u>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</u> | <u>189.285.000</u> | <u>184.070.000</u> | <u>97,24</u> |
| Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 51.011.000 | 51.011.000 | 100,00 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 51.011.000 | 51.011.000 | 100,00 |
| Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 113.274.000 | 108.074.000 | 95,41 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 88.274.000 | 83.274.000 | 94,34 |
| Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 25.000.000 | 24.800.000 | 99,20 |
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 25.000.000 | 24.985.000 | 99,94 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 25.000.000 | 24.985.000 | 99,94 |
| JUMLAH SPJ | 4.857.795.100 | 4.651.466.408 | 95,75 |

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sesuai dengan *Time Schedule* dan hasil (*outcome*) yang diharapkan. Seluruh penggunaan dana dari APBD Tahun 2022 baik kegiatan bersifat rutin maupun pembangunan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif dan efisien.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan berupa kegiatan-kegiatan/ program yang dilaksanakan pada Tahun 2022 dikategorikan sangat berhasil (realisasi anggaran 95,75 % dan realisasi fisik 100 %). Hal ini diketahui dari penghitungan dengan pengukuran skala ordinal (skala 85 – 100 = Sangat Baik/ Berhasil). Pencapaian kinerja tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan-kegiatan telah dapat mendukung atau mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026. Ini artinya kebijakan dan program yang dikerjakan bersinergi dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

Keberhasilan kinerja tersebut dikarenakan ada dukungan dana dari APBD, dan didukung SDM Aparatur serta kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk berperan serta aktif dalam program-program perencanaan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

B. SARAN

Untuk peningkatan kinerja ditahun-tahun yang akan datang agar lebih berhasil lagi kiranya perlu dukungan penuh dari Pemerintah Daerah baik dari aspek personal, sarana dan prasarana serta dana dan peran yang lebih pro aktif para pelaksana. Secara Operasional kiranya dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bekerjasama dengan lembaga, organisasi maupun perkumpulan perempuan untuk melakukan pendampingan mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
2. Meningkatkan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantapan dan keterpaduan program;
3. Meningkatkan sarana Advokasi kepada pihak terkait (formal maupun informal, tokoh masyarakat, agama dan pihak-pihak lain) dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap program.

Lamongan, Januari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN



UMURONAH, S.ST.,M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19721111 199203 2 010

LAMPIRAN

- MATRIK RENCANA STRATEJIK (RS)
- PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2022
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
- PENGHARGAAN DLL

MATRIKS RENCANA STRATEJIK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. TABEL MATRIK TUJUAN

| Tujuan | Indikator Tujuan | Rumus | Kondisi Awal Tahun 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi akhir | |
|---|----------------------------------|--|-------------------------|---------|------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | <p>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender dalam partisipasi ekonomi dan politik.</p> <p style="text-align: center;">$1/3 (I_{par} + I_{DM} + I_{inc-dist})$</p> <p>I_{par} = Indeks Keterwakilan di parlemen I_{DM} = Indeks pengambilan keputusan I_{inc-dist} = Indeks distribusi pendapatan</p> | 74,05 % | 73,97 % | Menunggu data dari BPS | 73,99 | - | 74,01 | - | 74,03 | - | 74,05 | - | 74,05 | - |

2. TABEL MATRIK SASARAN

| Sasaran | | Rumus | Kondisi Awal Tahun 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi akhir | |
|--|--|---|-------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|
| Uraian | Indikator Kinerja | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan | Persentase Peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik) | Jumlah Perempuan Yang Bekerja dibagi Jumlah perempuan Usia 20 – 64 dikali 100 | - | 65,37% | 65,37% | 65,57% | - | 65,77% | - | 65,97% | - | 66,17% | - | 66,17% | - |
| Meningkatnya pemenuhan hak anak | Persentase Pemenuhan hak anak | Jumlah forum anak yang ada di Lamongan dibagi Jumlah desa di lamongan dikali 100 | - | 12,66% | 12,66% | 14,77% | - | 16,88% | - | 18,99% | - | 21,10% | - | 21,10% | - |
| Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak | Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan | Jumlah kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan kasus kekerasan perempuan dikali 100 | 60 % | 37 % | 78,95 % | 39 % | - | 41 % | - | 43 % | - | 45 % | - | 45 % | - |
| | Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan | Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan kasus kekerasan anak dikali 100 | 55,56 % | 50 % | 75,56 % | 55 % | - | 60 % | - | 65 % | - | 70 % | - | 70 % | - |
| Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah | Nilai Sakip Perangkat Daerah | Penilaian dari Inspektorat | - | 82.30 | 86,55 | 82.40 | - | 82.50 | - | 82.60 | - | 82.70 | - | 82.70 | - |

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
Plt. KEPALA DINAS PP DAN PA KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN IV TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengembangan kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas PP dan PA Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021**, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, sebagai berikut:

KEDUDUKAN

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dan strategis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Menyelenggarakan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pembinaan administrasi Dinas;
- e. Menyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dengan Bupati Lamongan memuat 4 (empat) sasaran kinerja Utama dengan 5 (lima) indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja pada Tahun 2022 sampai dengan triwulan IV :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

| SASARAN/KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Target tahunan | Target Per Tribulan | | | | Realisasi Per Tribulan | | | | Realisasi s/d saat ini | Capaian |
|---|---|----------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|---|---|------------------------|---------|
| | | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | | |
| 1. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan | Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan | 65,37 % | - | 65,33% (282120 431858) | 65,36% (282.252 431858) | 65,37% (282.315 431858) | - | 65,33% (282120 431858) | 65,36% (282.252 431858) | 65,37% (282.315 431858) | 65,37% | 100% |
| | a) Persentase Peningkatan Perempuan Produktif yang Berperan dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik) | 4,25 % | - | - | 4,22% | 4,25% | - | - | 4,22% [(293360 - 281472) / 281472]* 100] | 4,25% [(293423 - 281472) / 281472] *100] | 4,25% | 100% |
| | b) Persentase Perempuan yang Berperan dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga | 72% | - | 72% | - | - | - | 72% | - | - | 72% | 100% |
| 2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | Persentase Pemenuhan Hak Anak | 12,66 % | - | 12,66% | - | - | - | 12,66% | - | - | 12,66% | 100% |
| | a) Persentase Tersedianya Data Profil Gender dan Anak | 40 % | 30% | - | - | 10% | 30% (3/10) | - | - | 10% (1/10) | 40% | 100% |
| | b) Persentase Forum Anak yang Terbentuk | 12,66 % | - | 12,66% | - | - | - | 12,66% (60/474) | - | - | 12,66% | 100% |

| SASARAN/KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Target tahunan | Target Per Tribulan | | | | Realisasi Per Tribulan | | | | Realisasi s/d saat ini | Capaian |
|---|---|----------------|---------------------|-----|-----|--------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------|
| | | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | | |
| 3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan anak | Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Diselesaikan | 37 % | 7% | 22% | 32% | 37% | 77,78% (7/9) | 73,68% (14/19) | 73,08% (19/26) | 78,95% (30/38) | 78,95% | 213,38% |
| | Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Diselesaikan | 37 % | 7% | 22% | 32% | 37% | 77,78% (7/9) | 73,68% (14/19) | 73,08% (19/26) | 78,95% (30/38) | 78,95% | 213,38% |
| | Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Diselesaikan | 50 % | 10% | 25% | 40% | 50% | 80% (4/5) | 61,90% (13/21) | 67,57% (25/37) | 75,56% (34/45) | 75,56% | 151,12% |
| | Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Diselesaikan | 50 % | 10% | 25% | 40% | 50% | 80% (4/5) | 61,90% (13/21) | 67,57% (25/37) | 75,56% (34/45) | 75,56% | 151,12% |
| 4. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 82,30 | - | - | - | 82,30 | 86,43 | 86,55 | - | - | 86,55 | 105,16% |
| | a) Nilai IKM Perangkat Daerah | 79,50 % | - | - | - | 79,50% | - | - | - | 89,50% | 89,50% | 112,58% |

Tabel 2.2

Capaian Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

| NO | Program | Anggaran Rp. | Target | | | | Realisasi | | | | Jumlah | Capaian |
|---------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | | |
| 1 | Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan | 135.380.000 | - | - | 97.190.950 | 38.189.050 | - | - | 97.190.950 | 37.469.050 | 134.660.000 | 99,47% |
| 2 | Program peningkatan kualitas keluarga | 96.011.000 | - | 65.000.000 | - | 31.011.000 | - | 64.500.000 | 500.000 | 30.992.000 | 95.992.000 | 99,98% |
| 3 | Program pemenuhan hak anak | 214.011.000 | - | 65.828.800 | 67.171.200 | 81.011.000 | - | 38.299.932 | 58.947.766 | 116.694.200 | 213.941.898 | 99,97% |
| 4 | Program pengelolaan sistem data gender dan anak | 40.370.000 | 3.891.000 | 15.166.200 | 15.166.200 | 6.146.600 | 3.891.000 | 15.166.200 | 15.166.200 | 6.146.600 | 40.370.000 | 100% |
| 5 | Program perlindungan perempuan | 193.633.100 | - | 49.411.000 | 10.468.100 | 133.394.000 | - | 15.807.800 | 37.798.200 | 140.027.100 | 193.633.100 | 100% |
| 6 | Program perlindungan khusus anak | 189.285.000 | - | 39.693.800 | 41.139.400 | 108.451.800 | - | 15.826.900 | 61.036.800 | 107.206.300 | 184.070.000 | 97,24% |
| 7 | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 3.989.105.000 | 729.059.640 | 1.086.652.182 | 917.488.848 | 1.139.043.630 | 686.968.551 | 1.160.090.198 | 915.192.791 | 1.026.547.870 | 3.788.799.410 | 94,98% |
| JUMLAH | | 4.857.795.100 | 768.950.640 | 1.321.751.982 | 1.148.624.698 | 1.139.043.630 | 690.859.551 | 1.309.691.030 | 1.185.817.707 | 1.465.098.120 | 4.651.466.408 | 95,75% |

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan yang memiliki Indikator Kinerja Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan dengan target kinerja sebesar 65,37%, pada triwulan IV telah terealisasi sebesar 65,37% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.
 - a. Persentase Peningkatan Perempuan Produktif yang Berperan dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik) dengan target kinerja sebesar 4,25%, pada triwulan IV telah terealisasi sebesar 4,25% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.
 - b. Persentase Perempuan yang Berperan dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga dengan target kinerja sebesar 72%, pada triwulan III telah terealisasi sebesar 72% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak yang memiliki Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Hak Anak dengan target kinerja 12,66% pada triwulan III telah terealisasi sebesar 12,66% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.
 - a. Persentase Tersedianya Data Profil Gender dan Anak dengan target kinerja untuk tahun 2022 sebesar 40% telah realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar 40% dengan rincian triwulan I telah terealisasi 30% dan triwulan IV telah terealisasi 10% sehingga capaian kinerjanya yang dihasilkan sebesar 100%.
 - b. Persentase Forum Anak yang Terbentuk dengan target kinerja sebesar 12,66% telah terealisasi pada triwulan II sebesar 12,66% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.
3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang diselesaikan dengan target kinerja sebesar 37% telah terealisasi pada Triwulan IV sebesar 78,95% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan 231,38%.
 - b. Persentase Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan dengan target kinerja sebesar 50% telah terealisasi sebesar 75,56% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 151,12%.
4. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah yang memiliki Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target kinerja sebesar 82,30 pada triwulan II telah terealisasi sebesar 86,55 sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 105,16%.
 - a. Nilai IKM Perangkat Daerah dengan target 79,5% pada triwulan IV telah terealisasi sebesar 89,50% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 112,58%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Adapun rencana tindak lanjut yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan capaian sehingga sesuai dengan target yg telah ditetapkan, adalah sebagai berikut :

1. Untuk indikator sasaran meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan dengan indikator kinerja Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan akan ditingkatkan dengan sosialisasi/bimtek/pelatihan perempuan sehingga mampu memperkecil perbedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta peran gender terbagi menjadi peran produktif. ;
2. Guna meningkatnya indikator kinerja persentase pemenuhan hak anak akan meningkatkan kinerja dengan mengikuti kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan serta pembentukan forum anak sampai dengan tingkat desa;
3. Melaksanakan koordinasi serta pendampingan dalam rangka Perlindungan Perempuan dan Anak dengan indikator kinerja persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan serta persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan dengan cara meningkatkan pendampingan korban kekerasan Perempuan dan Anak ;
4. Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah agar tercapai Nilai SAKIP Perangkat Daerah serta perlunya studi komparasi ke Daerah yg Nilai Sakip lebih dari Kabupaten Lamongan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja tribulan IV Tahun 2022:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan yaitu dari target tahunan sebesar 65,37% telah terealisasi sebesar 65,37% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.
3. Persentase Pemenuhan Hak Anak telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan yaitu dari target tahunan sebesar 12,66% telah terealisasi sebesar 12,66% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%;
4. Dalam pencapaian sasaran yang telah diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target Presentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan sudah melebihi target dari perencanaan yang telah ditetapkan yaitu dari target tahunan sebesar 37% telah terealisasi sebesar 78,95% sehingga capaian sebesar 213,38% dan Presentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan sudah melebihi target dari perencanaan yang telah ditetapkan yaitu dari target tahunan sebesar 50% telah terealisasi sebesar 75,56% sehingga capaian sebesar 151,12%;
5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah telah sesuai perencanaan yang ditetapkan dengan target kinerja tahunan sebesar 82,30 pada tribulan II telah terealisasi sebesar 86,55 sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 105,16%. Untuk realisasi pada tribulan III dan IV, masih menunggu penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan.

Lamongan, 30 Desember 2022

Pit. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN



ETIK SULISTYANI, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19710722 199203 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ETIK SULISTYANI, S.Sos., M.Si**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.**

Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Lamongan, Oktober 2022

**PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN**



Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN LAMONGAN**



ETIK SULISTYANI, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710722 199203 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan | Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan | 65.37 % |
| | | Persentase Peningkatan Perempuan Produktif yang Berperan dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik) | 4.25 % |
| | | Persentase Perempuan yang Berperan dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga | 72.00 % |
| 2 | Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | Persentase Pemenuhan Hak Anak | 12.66 % |
| | | Persentase Tersedianya Data Profil Gender dan Anak | 40 % |
| | | Persentase Forum Anak yang Terbentuk | 12.66 % |
| 3 | Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak | Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Diselesaikan | 37 % |
| | | Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Diselesaikan | 50 % |
| | | Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Diselesaikan | 37 % |
| | | Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Diselesaikan | 50 % |
| 4 | Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 82.30 % |
| | | Nilai IKM Perangkat Daerah | 79,50 % |

| PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | KET |
|---|---------------------|------|
| 1 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Rp. 135.380.000,- | APBD |
| 2 Perlindungan Perempuan | Rp. 193.633.100,- | APBD |
| 3 Peningkatan Kualitas Keluarga | Rp. 96.011.000,- | APBD |
| 4 Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Rp. 40.370.000,- | APBD |
| 5 Pemenuhan Hak Anak | Rp. 214.011.000,- | APBD |
| 6 Perlindungan Khusus Anak | Rp. 189.285.000,- | APBD |
| 7 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Rp. 3.989.105.000,- | APBD |


Lamongan, Oktober 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN



Dr. H. HEBNUR EFENDI, MBA.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN



ETIK SULISTYANI, S.Sos., M.Si.
 Pemoma Tingkat I
 NIP. 19710722 199203 2 005

**PENGHARGAAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2022**







BUPATI LAMONGAN

PIAGAM PENGHARGAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/184/KEP/413.013/2022 tentang Juara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lamongan (SINOLLA) Tahun 2022 dengan ini memberikan penghargaan atas inovasi :

Spiker Perak

(Sistem Pengaduan Online Terhadap Perempuan dan Anak)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

sebagai

TOP 15

**KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK LAMONGAN
(SINOLLA) TAHUN 2022**

LAMONGAN, 26 MEI 2022
BUPATI LAMONGAN



Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M.BA



**INOVASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2022**

SPIKER PERAK "Sistem Pengaduan Online Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak"

Sebagai media pelayanan dan pengaduan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sosial mengenai pelanggaran hak asasi atau kekerasan, misalnya perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan penelantaran serta eksploitasi anak yang dapat diakses secara cepat melalui media daring. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tindak kekerasan pada Perempuan dan Anak, antara lain yaitu faktor ekonomi, pendidikan, sosial budaya, kemajuan teknologi dan komunikasi serta faktor lingkungan.

Inovasi ini muncul untuk menyukseskan program *Three Ends*, yaitu :

1. Untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Mengakhiri perdagangan manusia; dan
3. Mengakhiri kesenjangan ekonomi.

Ketiga masalah yang menjadi isu daerah yang belum terselesaikan dan inovasi ini dibuat sebagai upaya /solusi dalam penyelesaian isu daerah yang ada.

